
**PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

Ahmad Murad¹ Wira Hendri² Ikhwan Wadi³ Rana Syarif Hidayat⁴

¹Universitas Gunung Rinjani

²Universitas Bumi Gora

Email : ahmadmurad2012@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi kasus pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Timur). Penelitian ini menggunakan data Primer dengan populasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, uji validitas, uji reliabilitas, asumsi klasik dan uji t dan uji f yang diolah menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur. Nilai T dihitung sebagai 0,004. Hasil yang diperoleh t tabel adalah sebesar 2,05183. Karena t hitung < t tabel ($-0,004 < 2,05183$) dan tingkat signifikansi > 0,05 ($0,997 > 0,05$). Penerapan sistem SAP berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Nilai t hitung sebesar 2,265. Hasil yang diperoleh t tabel sebesar 2,05183. Karena t hitung > t tabel ($2,265 > 2,05183$). Sedangkan tingkat signifikansinya sebesar 0,014. Karena tingkat signifikansi < 0,05 ($0,014 < 0,05$). Pengelolaan keuangan daerah dan implementasi SAP berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan tingkat signifikansi 0,044 maka < 0,05.

Kata Kunci: Kinerja Pemerintahan, Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Desentralisasi pembangunan dalam bidang ekonomi telah dituangkan dan diimplementasikan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.

Desentralisasi ini mengandung pengertian bahwa daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber-sumber keuangan sendiri dan didukung dengan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Hal ini juga berdampak pada kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang yang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses transisi dan desentralisasi ini menuntut setiap instansi pemerintah daerah untuk mengupayakan dan menerapkan sistem pemerintahan yang bersih dan kuat (*type of a clean or good governance*). Selain itu, urgensi terhadap kebutuhan sistem pemerintahan seperti ini tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima, transparan dan akuntabel.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah sebagai berikut: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.”.

Secara umum pengelolaan keuangan daerah sering menghadapi masalah ketika perencanaan dan penganggaran tidak dilakukan dan tidak berjalan dengan baik. Banyak permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah diantaranya, pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih belum maksimal, perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepala daerah. Adanya proses perencanaan kegiatan terpisah dari penganggaran yang disebabkan oleh kualitas tenaga perencana di OPD yang terbatas baik secara kuantitas maupun kualitasnya, perencanaan hanya dibuat oleh pengguna anggaran dan bendahara, kelemahan lain adalah indikator capaian seringkali tidak jelas dan tidak terukur serta pendalaman analisis yang kurang dan seharusnya mengarah pada “*how to achieve*” suatu target bukannya memenuhi “*order*” kepentingan.

Dalam proses perencanaan perlu didorong kontribusi setiap OPD untuk mengatasi kemiskinan sesuai tupoksi dan pengkoordinasian kegiatan antar OPD dalam proses perencanaan yang berimplikasi pada sinergisitas sehingga jauh dari kegiatan ego-sektoral dan menyebabkan ketimpangan kegiatan antar OPD. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari pespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Mardiasmo, 2004).

Organisasi pemerintah senantiasa menghadapi permasalahan yang kompleks dan persoalan yang paling umum adalah adanya kesalahan administrasi serta tindak pidana korupsi. Permasalahan mendasar ini haruslah dipikirkan dan dicarikan solusinya apakah dengan melakukan penyederhanaan atau penambahan lembaga-lembaga pengawasan yang ada ataukah membuat suatu aturan yang jelas dan tegas dengan tetap berpegang teguh pada upaya-upaya peningkatan kinerja pemerintah (Ihyaul, 2004:85).

Sebagai langkah awal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) adalah implementasi sistem akuntansi pemerintahan yang adil, transparan dan akuntabel. Akuntansi pemerintahan dalam hal ini dipakai sebagai alat untuk melakukan upaya *elaborasi good governance* ke tataran yang lebih riil (Mardiasmo, 2002). Artikulasi dan elaborasi yang dimaksudkan dapat melalui akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan audit atau pemeriksaan sektor pemerintah..

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010). Hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah

Sistem Akuntansi. Implementasi Sistem Akuntansi secara optimal akan menjadikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan akan menjadi berkesinambungan dan optimal.

Pemerintah daerah harus bisa mengimplementasikan berbagai formula baru yang efektif dan efisien terkait dengan pengelolaan keuangan, misalnya penerapan sistem akuntansi secara optimal dalam setiap perencanaan, eksekusi dan pelaporan kegiatan. Penerapan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan dan kebijakan pusat serta implementasi sistem akuntansi yang baik tentu akan memudahkan setiap proses baik perencanaan ataupun pelaporan nanti.

METODE PENELITIAN

Sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2013: 81). Dari masing-masing OPD diambil 3 orang responden yang terdiri dari Kepala Didas/ Badan, Sekretaris, Kasubag Program/ Kasubag Keuangan. Pada Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013: 85) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik penarikan sampel *purposive* ini dilakukan dengan cara memilih sampel dari suatu populasi. Dan berikut ini adalah kriterianya Kuesioner yang disebar sebanyak 99 kuesioner

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbetuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. (Sugiyono, 2013: 14). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber atau obyek penelitian. Data primer diperoleh melalui kuesioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan Kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji statistic sebagai berikut.

Tabel 1
Hasil Uji Parsial (Ujit t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	14,67	5,81		2,52	,018
Sistem Pengelolaan Keuangan_daerah	,000	,068	-,001	-,004	,997
Implementasi_SAP	,348	,132	,454	2,625	,014

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah apabila dilakukan dengan baik dan optimal tentu akan memiliki hubungan atau berdampak pada kinerja pemerintah daerah. Namun berbeda dengan hasil yang peneliti temukan di lapangan yang ada di OPD-OPD yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur. Sistem pengelolaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sistem pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,000. Nilai t hitung sebesar - 0,004. Hasil diperoleh untuk t table sebesar 2,05183. Karena t hitung $< t$ table ($0,004 < 2,05183$) maka H_0 diterima, H_a ditolak. Artinya sistem pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini juga dibuktikan dari tingkat signifikansi sebesar 0,997. Karena tingkat signifikansi $> 0,05$ ($0,997 > 0,05$) maka H_0 diterima. Artinya sistem pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Salah satu faktor penyebab tidak berpengaruhnya pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah adalah faktor internal para responden yaitu masa jabatan dari masing-masing responden dimasing-masing OPD rata-rata kurang dari 5 tahun, dan masih tergolong kategori baru menjabat sehingga tingkat pemahaman tentang pengelolaan keuangan dimasing-masing OPD masih tahap penyesuaian. Besar kemungkinan responden memberikan jawaban di dalam kuesioner yang disebar berdasarkan pengalaman sebelumnya sehingga belum maksimal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah (2015), Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja pemerintah daerah, (2) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lintong (2017), berjudul “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu”. Dengan hasil penelitian bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 238/PMK.05/2011 adalah rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Implementasi SAP menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Prosedur dan tata laksana yang terkandung dalam SAP akan meningkatkan kinerja pemerintah jika diimplementasikan dengan optimal. Pentingnya pelaksanaan SAP yang optimal akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh nilai koefisien regresi variabel sistem pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,348. Nilai t hitung sebesar 2,625. Hasil diperoleh untuk t table sebesar 2,05183. Karena t hitung $> t$ - table ($2,625 > 2,05183$) maka H_0 ditolak, H_a diterima. Artinya implementasi sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan tingkat signifikansi sebesar 0,014. Karena tingkat signifikasnsi $< 0,05$ ($0,014 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya implementasi sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sistem keuangan daerah mempunyai arti sangat penting dalam pelaksanaan

pemerintah, oleh karena itu sistem akuntansi keuangan daerah diupayakan untuk terus berjalan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintah, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat. Kinerja pemerintah akan terlaksana dengan maksimal jika dilaksanakannya sistem akuntansi pemerintah dengan baik sehingga menimbulkan dukungan kuat terhadap kinerja pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elia Saerang (2017), Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. Implementasi Sistem Akuntansi berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Kotamobagu.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2013), Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah. Hasil penelitiannya bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Karianga:2011). SAP akan menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah menuju kepada pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan memulai upaya untuk mengembangkan SAP. Di Indonesia, bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dua indikator ini dirasa memiliki hubungan dengan kinerja pemerintah daerah. Dari kuesioner yang peneliti sebar di seluruh OPD di Kabupaten Lombok Timur, peneliti tidak menemukan satu pun nilai 1 dan 2 yang menandakan OPD tidak menyetujui pelaksanaan Kinerja keuangan dan SAP berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Lombok Timur. Rata-rata memberikan nilai 4 dan 3, ini menandakan bahwa kinerja pemerintahan di Kabupten Lombok Timur berjalan optimal tidak terlepas dari peran pengelolaan keuangan daerah yang baik dan pelaksanaan SAP yang optimal.

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan Sig 0,044 maka $< 0,05$ sehingga H_0 ditolak, dengan demikian H_a diterima. Berdasarkan output diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa antara X_1 dan X_2 secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y artinya sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi sistem akuntansi pemerintah berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur. Sistem implementasi SAP berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Pengelolaan keuangan daerah dan Implmentasi SAP berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Timur.

REFRENSI

Adawiyah (2015), Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Aritas, Kustandi. (1995). Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: PT Alumn.

- Diana, Lintong. 2017. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu. Jurnal Maksi Vol 06 No 01 11i-127. Universitas Sam Ratulangi.
- Dwiyanto, Agus.2006. Mewujudkan Good Governance Melayani Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Elia Saerang (2017), Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga.Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A., dan Rohman. 2008. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Maksi Vol7 No.2. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A, dan Rohman. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda Di Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi & Bisnis Vol.9 No.1 ISSN 1412-0852.Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jayanti (2015), Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas
- Karianga, Hendra. 2011. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: PT Alumni.
- Lapian, (2015) Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam pengelolaan Laporan Keuangan
- Lintong (2017), Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu
- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta: BPFE Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Permendagri No. 13. 2006. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prawirosentono, Suyadi. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia “Kebijakan. Kinerja Karyawan”. BPFE:Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Tahun 2004 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).]
- Republik Indonesia Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.